AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Volume 4 Nomor 1, Januari 2023
http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/akunsika

Pengukuran Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas pada RSUD Labuang Baji, Provinsi Sulawesi Selatan

St Marwa Akrama
PT Biogen Scientific Indonesia
marwaakrama7@gmail.com

Anna Sutrisna Sukirman
Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia
annasutrisnasukirman@gmail.com

Eti Yusrianti
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia
etiyusrianti7@gmail.com

(***Diterima**: 14-Oktober-2022; **direvisi:** 24-Januari-2023; **dipublikasikan**: 30-Januari-2023*)

Abstract

Value for money is one of the performance measurements of public sector organization that includes input, output, and outcome indicators that can be used as measuring tool in assessing economic, efficiency, and effectiveness performance. Labuang Baji Hospital, South Sulawesi Province, has not emphasized the value for money measurement because the measuring instrument and performance achievement is only at the output level. Measurement of value for money can produce a more complex and comprehensive assessment so that it can be used as a benchmark and consideration in evaluating performance. This activity aims to measure economic, efficiency, and effectiveness performance by measuring value for money in the programs/activities of the Labuang Baji Hospital, South Sulawesi Province. The performance measurement at Labuang Baji Hospital, South Sulawesi Province uses the value for money method by measuring the economic, efficiency, and effectiveness level of the program based on the data obtained by document analysis technique. The type of activity used is field research. Based on the results of activities and descriptions, it is known that from three programs, seven activities, and nine subactivities of RSUD Labuang Baji, South Sulawesi Province, the average economic performance value is 103.39%, the average efficiency performance value is 93.55%, and the average effectiveness performance value is 103.39%. This shows that the programs/activities of the Labuang Baji Hospital are in the economic, efficient, and effective criteria with a final performance value of 100.04% which is in the criteria of success.

***Keywords:** Performance; Economy; Efficient Effectiveness; Value for Money*

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan pengukuran value for money pada program/kegiatan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Value for money merupakan salah satu pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang dapat dijadikan alat ukur dalam menilai kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja. Pengukuran kinerja pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode value for money dengan mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari program yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dengan teknik analisis dokumen. Adapun tipe kegiatan yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Berdasarkan hasil kegiatan dan deskripsi diketahui bahwa dari tiga program, tujuh kegiatan, dan sembilan subkegiatan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh rerata nilai kinerja ekonomi yakni 103,39%, rerata nilai kinerja efisiensi yakni 93,55%, dan rerata nilai kinerja efektivitas yakni 103,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan RSUD Labuang Baji berada pada kriteria ekonomis, efisien, dan efektif dengan nilai kinerja akhir 100,04% yang berada pada kriteria berhasil.

Kata Kunci: Kinerja; Ekonomi; Efisiensi; Efektivitas; Value For Money

Copyright © 2023, ***AKUNSIKA***, ISSN 2722-3701 (cetak), 2722-3590 (online)

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan warga negara. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara adalah dengan dibentuknya rumah sakit. Rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji adalah salah satu rumah sakit Tipe B Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pemerintah secara paripurna sesuai dengan visi misi RSUD Labuang Baji. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tanggal 08 Agustus 2012, menetapkan bahwa RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah penuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 2 Ayat 1, BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab untuk membantu mencapai tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Sejalan dengan tujuan BLUD tersebut, RSUD Labuang Baji selaku BLUD memiliki misi yang salah satunya adalah mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran sesuai dengan tujuan BLUD.

Berdasarkan faktor keberhasilan tersebut, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, menyatakan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitasnya. Selain itu, masyarakat mengetahui bahwa instansi pemerintah sering mengalami pemborosan dana dan sasaran kinerja yang tidak sesuai dengan target atau tujuan publik sehingga pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah.

Mardiasmo (2018:151) menyatakan bahwa pengukuran kinerja instansi pemerintah dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya, pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik, dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja yang dapat mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu instansi pemerintah adalah dengan pengukuran kinerja value for monry.

Mardiasmo (2018:160) menyatakan bahwa value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada instansi pemerintah. Value for money adalah alat pengukuran yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam menilai anggaran berbasis kinerja. “Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output” (Mardiasmo, 2018:102).

Indikator dalam value for money meliputi indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ekonomi menekankan pada pengelolaan sumber daya/anggaran (input) secara cermat dan tidak ada pemborosan dalam menghasilkan output. Efisiensi berarti bahwa suatu output tertentu dapat dihasilkan dari penggunaan anggaran/ sumber daya (input) yang serendah-rendahnya. Efektivitas berarti suatu output mencapai target/sasaran dan berdampak pada kepentingan publik (outcome).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan, diperoleh keterangan bahwa alat ukur pada RSUD Labuang Baji berada pada target dan realisasinya. Hal ini sejalan dengan data LAKIP RSUD Labuang Baji yang menyatakan bahwa capaian kinerja kegiatan masih dalam tingkat output, yaitu evaluasi kinerja dilakukan dari hasil yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah.

Alat ukur dan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut hanya berada pada pengukuran nilai kinerja output yang terdapat pada value for money. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa evaluasi kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan belum menekankan atau sampai berada pada tahap pengukuran kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Copyright © 2023, *AKUNSIKA*, ISSN 2722-3701 (cetak), 2722-3590 (online)

Instansi pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi secara garis lurus harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Oleh karena itu, value for money yang memuat indikator input, output, dan outcome dapat dijadikan alat ukur dalam menilai kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas RSUD Labuang Baji karena dapat menghasilkan penilaian yang lebih kompleks dan menyeluruh yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja dan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang lebih baik pada periode-periode selanjutnya.

RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, telah membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ke perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan khususnya pembangunan sektor kesehatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Renja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 memuat tiga program, diantaranya adalah: 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah; 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai hasil dari tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut diantaranya adalah: 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah; dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah memiliki tingkat capaian kinerja indikator sasaran diantaranya adalah: 1) Persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji senilai 96,72%; dan 2) Persentase temuan material senilai 200%. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit memiliki tingkat capaian kinerja indikator sasaran diantaranya adalah: 1) Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) senilai 82,18%; 2) Rata-rata lamanya pasien di rawat (LOS) senilai 71,4%; 3) Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI) senilai 42,8%; 4) Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO) senilai 60%; 5) Menurunnya angka kematian kasar (GDR) senilai 74%; dan 6) Menurunnya angka kematian setelah dirawat (NDR) senilai 67%.

Sumber pembiayaan dari pelaksanaan tiga program RSUD Labuang Baji bersumber dari dana APBD dan pendapatan rumah sakit. Anggaran dana APBD dan pendapatan BLUD RSUD Labuang Baji tahun 2021 senilai Rp191.684.331.875,00 dan yang terealisasi senilai Rp185.403.233.142,00 (96.72%) dengan output terlaksananya tiga program dan tujuh kegiatan.

Pengelolaan anggaran rumah sakit diharapkan berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi tidak sebanding dengan capaian kinerja indikator sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa suatu capaian program/kegiatan yang dijalankan akan mempengaruhi capaian indikator sasaran yang diperoleh. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa kinerja RSUD Labuang Baji belum maksimal dan belum seimbang antara input dan outcome, maka diperlukan pengukuran kinerja value for money yang dapat mengukur tingkat ekonomi efisiensi, dan efektivitasnya sehingga dapat meminimalkan capaian indikator sasaran sekaligus program/kegiatan yang belum sesuai dengan target.

Pengukuran kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan juga diperlukan karena program/kegiatan yang dilakukan didanai oleh pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat/pasien. Value for money merupakan wujud untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (public money) yang akuntabel, transparan, dan berdaya guna dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat dan memperbaiki proses penganggaran RSUD Labuang Baji.

Penggunaan pengukuran value for money disesuaikan dengan kata kunci yang dinyatakan dalam PSAP Nomor 4 Tahun 2010, tujuan dari BLUD, misi dari RSUD Labuang Baji, sasaran dan tujuan dari program/ kegiatan RSUD Labuang Baji, dan oleh seorang pakar/ahli sebelumnya, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penggunaan pengukuran value for money dalam menilai kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tidak memerlukan analisis data yang banyak dan proses yang panjang, sehingga pen-

gukuran dapat dilakukan dengan sumber daya manusia yang sedikit, biaya yang lebih murah, dan kurun waktu yang cepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, A.B. dan Gustia, W. (2016) berjudul Analisis Value For Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor sebelum mengukur kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, terlebih dahulu indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome harus diketahui. Hal tersebut juga ingin dilakukan pada penelitian ini tetapi perbedaannya pada pengukuran nilai akhir tidak dilakukan oleh Setiawan, A.B. dan Gustia, W. yang mencakup pengukuran indikator input, output, dan outcome secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sulistyanto, A. (2013) yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance pada Dinas Kesehatan Kota Madiun sebelum melakukan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, terlebih dahulu menentukan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome. Perbedaan yang ingin dilakukan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyanto, A. adalah pada nilai efektivitas, indikator outcome diperoleh dari rumus interval kepuasan masyarakat berupa indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengukuran Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan ialah value for money adapun tipe kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah proses pengambilan data dengan mengunjungi tempat penelitian secara langsung. Penulis mengambil data dengan mengunjungi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas pada Setiap Program

Ekonomi merupakan perbandingan input rencana berupa target anggaran dengan input realisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter. Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\textit{Input}\ \text{Rencana (Anggaran)}}{\textit{Input}\ \text{Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$$

Input Rencana (Anggaran): Anggaran/ dana yang direncanakan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan RSUD Labuang Baji

Input Realisasi (Capaian): Realisasi anggaran/dana yang dikeluarkan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan RSUD Labuang Baji

Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja ekonomi yang dilakukan pada program/kegiatan/sub kegiatan RSUD Labuang Baji tahun 2021.

Tabel 1 Pengukuran Kinerja Ekonomi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub- Kegiatan	*Input* Rencana (Rp)	*Input* Realisasi (Rp)	Tingkat Ekonomi	Ket.
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	74.719.349.577	74.644.312.223	100,10%	Cukup Ekonomis
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	700.000.000	606.366.000	115,44%	Ekonomis
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6.172.947.441	5.998.371.841	102,91%	Ekonomis
4	Pemelihara-an/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	790.500.000	789.278.000	100,15%	Cukup Ekonomis
5	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	75.798.903.509	70.294.726.393	107,83%	Ekonomis
	Rerata Nilai Ekonomi	158.181.700.527	152.333.054.457	103,84%	Ekonomis

Sumber: Data Diolah, 2022

Copyright © 2023, *AKUNSIKA*, ISSN 2722-3701 (cetak), 2722-3590 (online)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1, diketahui bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki lima kegiatan dengan lima subkegiatan. Program ini berjalan secara ekonomis dengan rerata nilai ekonomi 103,84%.

Tabel 2 Pengukuran Kinerja Ekonomi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sub-Kegiatan	*Input* Rencana (Rp)	*Input* Realisasi (Rp)	Tingkat Ekonomi	Ket.
1	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	30.848.166.313	30.840.413.413	100,03%	Cukup Ekonomis
2	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk, dan bahan habis pakai lainnya)	1.066.042.835	916.389.920	116,33%	Ekonomis
3	Pengadaan obat, vaksin, makanan, dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	696.342.200	666.864.292	104,42%	Ekonomis
	Rerata Nilai Ekonomi	**32.610.551.348**	**32.423.667.625**	**100,58%**	**Ekonomis**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 2, diketahui bahwa program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memiliki satu kegiatan dengan tiga subkegiatan. Program ini berjalan ekonomis dengan rerata nilai ekonomi adalah 100,58%

Tabel 3 Pengukuran Kinerja Ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

No	Sub-Kegiatan	*Input* Rencana (Rp)	*Input* Realisasi (Rp)	Tingkat Ekonomi	Ket.
1	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	892.080.000	646.511.060	137,98%	Ekonomis
	Rerata Nilai Ekonomi	**Rp892.080.000**	**Rp646.511.060**	**137,98%**	**Ekonomis**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 3, diketahui bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan hanya memiliki satu kegiatan dengan satu subkegiatan. Program ini berjalan ekonomis dengan rerata nilai ekonomi adalah 137,98%.

Efisiensi terkait dengan penggunaan *input* berupa anggaran atau kas untuk menghasilkan *output* berupa barang atau jasa. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Nilai\ Kinerja\ Output}{Nilai\ Kinerja\ Input}\ x\ 100\%$$

Keterangan:
Nilai kinerja output: Persentase realisasi keuangan atau capaian keuangan dari program/kegiatan/subkegiatan
Nilai Kinerja Input: Persentase dari nilai kinerja ekonomi
Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja efisiensi yang dilakukan pada kegiatan/ subkegiatan RSUD Labuang Baji tahun 2021:

Tabel 4 Pengukuran Kinerja Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub-Kegiatan	Nilai Kinerja *Output*	Nilai Kinerja *Input*	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	99,90%	100,10%	99,80%	Cukup Efisien
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	86,62%	115,44%	75,03%	Sangat Efisien
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	97,17%	102,91%	94,42%	Efisien
4	Pemelihara-an/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	99,85%	100,15%	99,70%	Cukup Efisien
5	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	92,74%	107,83%	86,01%	Sangat Efisien
Rerata Nilai Efisiensi		**96,30%**	**103,84%**	**92,74%**	**Efisien**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 4, diketahui bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki lima kegiatan dengan lima subkegiatan. Program ini berjalan secara efisien dengan nilai 92,74%

Tabel 5 Pengukuran Kinerja Efisiensi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sub-Kegiatan	Nilai Kinerja *Output*	Nilai Kinerja *Input*	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasili-tas layanan kesehatan	99,97%	100,03%	99,94%	Cukup Efisien
2	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk, dan bahan habis pakai lainnya)	85,96%	116,33%	73,89%	Sangat Efisien
3	Pengadaan obat, vaksin, makanan, dan minuman serta fasilitas esehatan lainnya	95,77%	104,42%	91,72%	Efisien
Rerata Nilai Efisiensi		**99,43%**	**100,58%**	**98,86%**	**Efisien**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 5, diketahui bahwa program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memiliki satu kegiatan dengan tiga subkegiatan. Program ini berjalan efisien dengan rerata nilai efisiensi adalah 98,86%.

Tabel 6 Pengukuran Kinerja Efisiensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sub-Kegiatan	Nilai Kinerja *Output*	Nilai Kinerja *Input*	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Peningkatan kompetensi dan kualifi-kasi sumber daya manusia kesehatan	72,47%	137,98%	52,52%	Sangat Efisien
Rerata Nilai Efisiensi		**72,47%**	**137,98%**	**52,52%**	**Sangat Efisien**

Sumber: Data Diolah, 2022

Copyright © 2023, *AKUNSIKA*, ISSN 2722-3701 (cetak), 2722-3590 (online)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 6, diketahui bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan hanya memiliki satu kegiatan dan dengan satu subkegiatan. Subkegiatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan memiliki target kinerja *output* yakni persentase pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi senilai 100% dan capaian kinerja *output* senilai 72,47% sehingga nilai kinerja *output* senilai 72,47%. Nilai kinerja *input* adalah 137,98%, sehingga tingkat efisiensi dari subkegiatan ini adalah sangat efisien yaitu senilai 52,52%.

Efektivitas (hasil guna) terkait dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (*outcome*). Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Nilai\ Kinerja\ Outcome}{Nilai\ Kinerja\ Output}\ x\ 100\%$$

Keterangan:
Nilai Kinerja *Outcome*: Persentase realisasi kinerja atau capaian fisik dari kegiatan/ subkegiatan Nilai Kinerja *Output*:
Persentase dari nilai kinerja efisiensi yang telah dilakukan sebelumnya.
Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja efektivitas yang dilakukan pada program/ kegiatan/subkegiatan RSUD Labuang Baji tahun 2021:

Tabel 7 Pengukuran Kinerja Efektivitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Sub-Kegiatan	Nilai Kinerja *Outcome*	Nilai Kinerja *Output*	Tingkat Efektivitas	Ket.
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	99,90%	100,10%	Efektif
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	86,62%	115,44%	Efektif
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	97,17%	102,91%	Efektif
4	Pemelihara-an/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	99,65%	100,15%	Efektif
5	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	100%	92,74%	107,83%	Efektif
Rerata Nilai Efektivitas		**100%**	**96,30%**	**103,84%**	**Efektif**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 7, diketahui bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki lima kegiatan dengan lima subkegiatan. Program ini berjalan efektif dengan rerata nilai efektivitas adalah 103,84%.

Tabel 8 Pengukuran Kinerja Efektivitas Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sub-Kegiatan	Nilai Kinerja *Outcome*	Nilai Kinerja *Output*	Tingkat Efektivitas	Ket.
1	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	100%	99,97%	100,03%	Efektif
2	Pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk, dan bahan habis pakai lainnya)	100%	85,96%	116,33%	Efektif
3	Pengadaan obat, vaksin, makanan, dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	100%	95,77%	104,42%	Efektif
Rerata Nilai Efektivitas		**100%**	**99,43%**	**100,58%**	**Efektif**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 8, diketahui bahwa program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memiliki satu kegiatan dengan tiga sub kegiatan. Program ini berjalan efektif dengan rerata nilai efektivitas adalah 100,58%.

Tabel 9 Pengukuran Kinerja Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

No	Sub-Kegiatan	Nilai Kinerja *Outcome*	Nilai Kinerja *Output*	Tingkat Efektivitas	Ket.
1	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	100%	72,47%	137,98%	Efektif
Rerata Nilai Efektivitas		**100%**	**72,47%**	**137,98%**	**Efektif**

Sumber: Data Diolah, 2022

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan subkegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan memiliki target *outcome* berupa 567 orang jumlah pegawai RS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian kinerja *outcome* 567 orang, sehingga nilai kinerja *outcome* senilai 100%. Nilai kinerja *output* adalah 72,47%, sehingga tingkat efektivitas dari subkegiatan ini adalah efektif yaitu senilai 137,99%.

Pengukuran Nilai Akhir

Pengukuran nilai akhir RSUD Labuang Baji dapat diukur dengan menghitung rata-rata dari penghitungan kinerja *input*, *output*, dan *outcome* subkegiatan RSUD labuang Baji. Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rerata Nilai Kinerja } \textit{Input} + \text{Rerata Nilai Kinerja } \textit{Output} + \text{Rerata Nilai Kerja } \textit{Outcome}}{3}$$

Berikut merupakan pengukuran nilai akhir yang dilakukan pada program/kegiatan/ subkegiatan RSUD Labuang Baji tahun 2021:

Tabel 10 Pengukuran Nilai Akhir Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Subkegiatan	Nilai Kinerja			Nilai Akhir	Ket.
		Input	*Output*	*Outcome*		
1	**Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**100,10%**	**99,90%**	**100%**	**100%**	**Berhasil**
2	**Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**	**115,44%**	**86,62%**	**100%**	**100,69%**	**Sangat Berhasil**
3	**Penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	**102,91%**	**97,17%**	**100%**	**100,03%**	**Berhasil**
4	Pemeliharaan/re-habilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100,15%	99,85%	100%	100%	Berhasil
5	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	107,83%	92,74%	100%	100,19%	Berhasil
Rerata Nilai Akhir		**105,29%**	**95,26%**	**100%**	**100,18%**	**Berhasil**

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 10, diketahui bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki lima kegiatan dengan lima subkegiatan. Terdapat satu subkegiatan yang menunjukkan nilai akhir lebih dari 100% dan empat subkegiatan yang bernilai 100%, secara keseluruhan rerata subkegiatan berjalan berhasil dengan rata-rata nilai akhir adalah 100,18%

Copyright © 2023, *AKUNSIKA*, ISSN 2722-3701 (cetak), 2722-3590 (online)

Tabel 11Pengukuran Nilai Akhir Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Subkegiatan	Nilai Kinerja			Nilai Akhir	Ket.
		Input	*Output*	*Outcome*		
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100,03%	99,97%	100%	100%	Berhasil
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	116,33%	85,96%	100%	100,69%	Sangat Berhasil
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	104,42%	95,77%	100%	100,03%	Berhasil
Rerata Nilai Akhir		105,29%	95,26%	100%	100,28%	Berhasil

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.13 diketahui bahwa program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memiliki satu kegiatan dengan tiga subkegiatan. Terdapat satu subkegiatan yang menunjukkan nilai akhir lebih dari 100% dan dua subkegiatan yang bernilai 100%, secara keseluruhan rerata subkegiatan berjalan berhasil dengan rata-rata nilai akhir adalah 100,28%.

Tabel 12 Pengukuran Nilai Akhir Program Peningkatan Kapasitas

No.	Subkegiatan	Nilai Kinerja			Nilai Akhir	Ket.
		Input	*Output*	*Outcome*		
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	137,98%	96,72%	100%	103,48%	Berhasil
Rerata Nilai Akhir		137,98%	96,72%	100%	103,48%	Berhasil

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan hanya memiliki satu kegiatan dengan satu sub kegiatan. Subkegiatan ini yang berjalan sangat berhasil dengan nilai akhir 103,48%.

Berdasarkan Pengukuran yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat varian nilai pada pengukuran kinerja ekonomi dan pengukuran kinerja efisiensi, sedangkan pada pengukuran kinerja efektivitas mempunyai nilai kinerja yang sama. Secara keseluruhan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai kinerja yang berhasil yaitu senilai 100,04%

Rerata nilai kinerja ekonomi senilai 103,39% yang artinya rerata dari semua program berjalan secara ekonomis, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran program RSUD Labuang Baji pada tahun 2021 dijalankan secara hemat dan hati-hati. Adapun rerata nilai efisiensi adalah 93,55% yang artinya rerata dari semua program berjalan secara efisien, hal ini menunjukkan bahwa program RSUD Labuang Baji pada tahun 2021 menghasilkan barang/jasa dengan efisien dengan penggunaan anggaran yang ekonomis. Sedangkan nilai kinerja efektivitas seluruh program/kegiatan/sub kegiatan berada pada kriteria efektif karena menunjukkan nilai kinerja lebih dari atau sama dengan 100%, hal ini disebabkan karena semua subkegiatan mampu menghasilkan *outcome* sesuai dengan target *outcome* yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan deskripsi kegiatan, pengukuran kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan value for money memperoleh nilai akhir yakni 100,04% yang artinya berhasil. Sehingga dapat diketahui bahwa RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 telah melaksanakan tiga program dengan sembilan kegiatan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik. Cetakan ke-1. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, Rudy. 2013. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Konsep, Praktik, Studi Kasus, Topik Lanjutan. Cetakan ke-1. Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Cetakan ke-1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. 2016. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi. Cetakan ke-1. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Cetakan ke-4. Yogyakarya: BPFE-Yogyakarya (Anggota IKAPI)

Majid, Jamaluddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan ke-1. Gowa: CV. Berkah Utami.

Mardiasmo.2018. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. 2018. Jaringan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. (Online), (https://peraturan.bpk.go.id), diakses 5 April 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2014. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. (Online), (https://peraturan.bpk.go.id), diakses 4 Desember 2021.

Rusydah, A.L. dan Mildawati, T., 2016. Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).

Setiawan, A.B. and Gustia, W., 2016. Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor. Jurnal Akunida, 2(2), pp.14-26.

Sulistyanto, A. 2013. Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance Pada Dinas Kesehatan Kota Madiun. In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (Vol. 1, No. 2).

Yuesti, Anik dkk. 2020. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan ke-1. Bali: CV. Noah Aletheia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2009. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. (Online), (https://peraturan.bpk.go.id), diakses 5 April 2021

Copyright © 2023, ***AKUNSIKA***, ISSN 2722-3701 (cetak), 2722-3590 (online)